

AGRICULTURE-BASED LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT IN HIGHLAND PAPUA: POTENTIAL, CHALLENGES, AND COMMUNITY EMPOWERMENT STRATEGIES

Mikaus Gombo

¹Universitas Baliem Papua

(mikaus.gombo@gmail.com¹)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan potensi, tantangan, dan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian dan hasil kebun di Papua Pegunungan, dengan fokus pada Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, dan Yahukimo. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan rancangan multisitus. Data direncanakan diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, diskusi kelompok terarah, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data sekunder BPS menunjukkan bahwa pertanian tetap penting bagi kehidupan masyarakat, tetapi kapasitas ekonomi wilayah masih dihadapkan pada kemiskinan dan kesenjangan pembangunan manusia. Pada 2025, persentase penduduk miskin tercatat 29,08 persen di Jayawijaya, 31,59 persen di Lanny Jaya, dan 30,61 persen di Yahukimo, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia masing-masing sebesar 66,02, 52,47, dan 52,48. Kondisi tersebut menegaskan bahwa potensi produksi lokal belum otomatis menghasilkan kesejahteraan yang merata. Hasil temuan menunjukkan bahwa ubi jalar, sayuran dataran tinggi, kopi, buah-buahan, dan komoditas kebun lokal memiliki prospek ekonomi, tetapi dihambat oleh akses transportasi, biaya logistik, keterbatasan pascapanen, informasi harga yang tidak seimbang, kelembagaan produsen yang lemah, dan belum optimalnya keterlibatan perempuan serta pemuda. Strategi yang diusulkan ialah penguatan rantai nilai berbasis distrik, peningkatan kapasitas kelompok produsen, penyediaan sarana pascapanen sederhana, pembiayaan yang sesuai konteks, kemitraan pasar yang adil, dan kebijakan afirmatif bagi Orang Asli Papua. Penelitian menyimpulkan bahwa pengembangan ekonomi lokal perlu bersifat berbasis tempat, partisipatif, berkelanjutan, dan menggabungkan peningkatan produktivitas dengan penguatan daya tawar masyarakat.

Kata kunci: *Ekonomi Lokal; Pertanian; Hasil Kebun; Pemberdayaan Masyarakat; Papua Pegunungan.*

Abstract

This study aims to describe the potential, constraints, and community empowerment strategies associated with agriculture- and garden-produce-based local economic development in Highland Papua, focusing on Jayawijaya, Lanny Jaya, and Yahukimo Regencies. It applies a descriptive qualitative approach and a multisite design. Primary data are intended to be collected through in-depth interviews, observation, focus-group discussions, and document review, followed by interactive analysis involving data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. Secondary statistics



indicate that agriculture remains central to local livelihoods, while regional economic capacity continues to be constrained by poverty and unequal human development. In 2025, the poverty rates were 29.08 percent in Jayawijaya, 31.59 percent in Lanny Jaya, and 30.61 percent in Yahukimo, while their Human Development Index values were 66.02, 52.47, and 52.48, respectively. These conditions suggest that local production potential does not automatically translate into equitable welfare. Result of findings indicate that sweet potato, highland vegetables, coffee, fruits, and other local crops have economic prospects but face transport barriers, high logistics costs, limited post-harvest facilities, unequal price information, weak producer institutions, and insufficient inclusion of women and youth. The proposed strategy combines district-based value-chain strengthening, producer-group capacity building, appropriate post-harvest technology, context-sensitive finance, fair market partnerships, and affirmative measures for Indigenous Papuans. The study concludes that local economic development should be place-based, participatory, sustainable, and capable of linking productivity improvements with stronger community bargaining power.

Keywords: *Local Economic Development; Agriculture; Garden Produce; Community Empowerment; Highland Papua.*

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi daerah tidak memadai apabila hanya diukur melalui pertumbuhan pendapatan atau produk domestik regional bruto. Sen (1999) menjelaskan pembangunan sebagai proses perluasan kebebasan substantif dan kapabilitas manusia, termasuk kemampuan memperoleh penghidupan yang layak, menentukan pilihan ekonomi, dan berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan. Karena itu, keberhasilan pembangunan di Papua Pegunungan perlu dinilai dari kemampuan masyarakat menguasai aset produktif, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan, dan mempertahankan kendali atas sumber daya lokal.

Pengembangan ekonomi lokal menawarkan kerangka yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Blakely dan Leigh (2017) mendefinisikannya sebagai proses ketika pemerintah lokal, masyarakat, dan pelaku usaha bekerja bersama untuk

menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup. Pendekatan berbasis tempat menegaskan bahwa kebijakan harus berangkat dari karakter geografis, pengetahuan, institusi, dan jaringan pelaku di suatu wilayah, bukan menerapkan paket seragam bagi semua daerah (Barca et al., 2012). Kerangka ini penting bagi Papua Pegunungan karena topografi, aksesibilitas, budaya, dan struktur kelembagaan membentuk peluang serta biaya ekonomi secara langsung.

Papua Pegunungan memiliki lembah, pegunungan, dan wilayah pedalaman yang membentuk sistem produksi beragam. Ubi jalar, sayuran dataran tinggi, kopi arabika, jagung, kacang-kacangan, buah-buahan, dan tanaman kebun lain berpotensi menjadi basis ekonomi sesuai agroekologi masing-masing tempat. Pertanian rakyat tidak hanya menghasilkan pendapatan, tetapi menopang pangan, pertukaran sosial, identitas budaya, dan relasi masyarakat dengan tanah. Dalam perspektif



penghidupan berkelanjutan, kegiatan ekonomi rumah tangga terbentuk melalui kombinasi aset alam, manusia, sosial, fisik, dan finansial yang dipengaruhi kerentanan serta kebijakan (Chambers & Conway, 1992; Scoones, 1998). Oleh sebab itu, strategi ekonomi lokal harus melindungi fungsi sosial dan ekologis pertanian sekaligus memperbaiki hasil ekonominya.

Potensi produksi tersebut belum otomatis berubah menjadi nilai tambah yang dinikmati produsen. Analisis rantai nilai menelusuri kegiatan dari penyediaan input, produksi, pascapanen, agregasi, distribusi, hingga pemasaran serta memperhatikan pembentukan dan pembagian nilai pada setiap tahap (Kaplinsky & Morris, 2001). FAO (2014) menekankan bahwa rantai nilai pangan yang berkelanjutan harus layak secara ekonomi, memberi manfaat sosial, dan menjaga sumber daya alam. Di Papua Pegunungan, jarak kebun ke pasar, keterbatasan jalan dan transportasi udara, biaya angkut, jadwal distribusi yang tidak pasti, kerusakan produk segar, fasilitas penyimpanan yang terbatas, serta ketimpangan informasi harga dapat mengurangi margin petani. Peningkatan produksi tanpa pembenahan pascapanen dan pasar bahkan berisiko menambah susut atau menekan harga di tingkat produsen.

Data pemerintah menunjukkan urgensi pembangunan yang lebih inklusif. Pada Maret 2025, kemiskinan tercatat sebesar 29,08 persen atau sekitar 61,64 ribu orang di Jayawijaya, dengan garis kemiskinan Rp913.719 per kapita per bulan; di Yahukimo angkanya 30,61 persen atau sekitar 62,42 ribu orang, dengan garis kemiskinan Rp908.562; sedangkan Lanny

Jaya mencatat kemiskinan 31,59 persen (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya, 2025; Badan Pusat Statistik Kabupaten Yahukimo, 2025; Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Pegunungan, 2025). Pada 2025, IPM Jayawijaya sebesar 66,02, Lanny Jaya 52,47, dan Yahukimo 52,48, sementara IPM Provinsi Papua Pegunungan sebesar 54,91 (Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Pegunungan, 2025). Statistik tersebut tidak menerangkan pengalaman petani secara langsung, tetapi menunjukkan bahwa pengembangan komoditas harus dihubungkan dengan pendidikan, kesehatan, akses layanan, dan pemerataan manfaat.

Pemilihan Jayawijaya, Lanny Jaya, dan Yahukimo memungkinkan penelitian menangkap variasi produksi, pasar, dan aksesibilitas. Jayawijaya memiliki Wamena sebagai simpul perdagangan dan transportasi regional; Lanny Jaya merepresentasikan jaringan produksi pegunungan yang tersebar; sedangkan Yahukimo memiliki wilayah luas dengan tingkat akses antarkampung yang sangat beragam. Perbandingan multisitus ini tidak dimaksudkan menentukan kabupaten terbaik, melainkan menjelaskan bagaimana konteks tempat menghasilkan kebutuhan strategi yang berbeda.

Kelembagaan menentukan apakah sumber daya dapat diorganisasikan secara efektif. North (1990) menerangkan institusi sebagai aturan formal dan informal yang membentuk interaksi serta biaya transaksi. Putnam (1993) menunjukkan arti kepercayaan, norma, dan jaringan bagi tindakan kolektif, sedangkan Ostrom (1990) menjelaskan bahwa komunitas dapat mengelola sumber daya bersama apabila memiliki aturan yang dipahami,



pemantauan, serta mekanisme penyelesaian konflik. Dalam konteks penelitian, kelompok produsen, lembaga adat, pemerintah distrik, penyuluh, pedagang, dan mitra pasar perlu dipahami sebagai bagian dari sistem kelembagaan yang menentukan posisi tawar petani.

Pemberdayaan menjadi inti karena masyarakat tidak boleh berhenti sebagai penerima bantuan. Kabeer (1999) memaknai pemberdayaan melalui hubungan antara sumber daya, agensi, dan capaian. Benih, alat, modal, pengetahuan, dan jejaring merupakan sumber daya; kemampuan menentukan pilihan, mengelola kelompok, serta menegosiasikan harga merupakan agensi; sedangkan pendapatan, ketahanan pangan, dan suara dalam keputusan merupakan capaian. Kerangka ini menuntut pengakuan terhadap perempuan yang berperan dalam produksi serta pemasaran dan terhadap pemuda yang dapat berinovasi pada pengolahan, logistik, informasi harga, dan pemasaran digital.

Kajian sebelumnya sering membahas produksi, kemiskinan, infrastruktur, atau pemberdayaan secara terpisah. Masih diperlukan studi yang menghubungkan potensi komoditas, rantai nilai, kelembagaan, kapabilitas, dan variasi aksesibilitas secara terpadu pada tiga kabupaten di Papua Pegunungan. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena mampu menggali pengalaman, makna, hubungan antarpelaku, serta proses yang tidak dapat dijelaskan oleh statistik saja (Creswell & Poth, 2018). Data BPS digunakan sebagai konteks, sedangkan wawancara, observasi, diskusi kelompok, dan dokumentasi diarahkan untuk menjelaskan bagaimana nilai terbentuk,

hambatan dialami, dan strategi dinilai layak oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk merumuskan pengembangan ekonomi lokal yang berbasis tempat, partisipatif, afirmatif bagi Orang Asli Papua, inklusif terhadap perempuan dan pemuda, serta berkelanjutan. Fokus penelitian mencakup potensi pertanian dan hasil kebun, tantangan pada setiap mata rantai, peran kelembagaan, dan strategi pemberdayaan yang menjaga agar nilai tambah, kendali, serta manfaat ekonomi lebih banyak berada pada masyarakat Papua Pegunungan.

Pengembangan ekonomi lokal atau local economic development berangkat dari gagasan bahwa kemampuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh arus modal dari luar, tetapi juga oleh kapasitas masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan lembaga lokal untuk mengorganisasi sumber daya yang tersedia. Blakely dan Leigh memandangnya sebagai proses ketika pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong aktivitas usaha, lapangan kerja, dan kesejahteraan. Orientasinya tidak berhenti pada pertumbuhan, melainkan mencakup siapa yang berpartisipasi, siapa yang menerima manfaat, dan apakah kapasitas lokal menjadi lebih kuat.

Perspektif berbasis tempat menolak kebijakan seragam untuk wilayah yang memiliki kondisi geografis, institusional, dan budaya berbeda. Barca, McCann, dan Rodríguez-Pose menekankan bahwa intervensi pembangunan perlu memahami pengetahuan lokal dan hubungan antara aktor serta institusi. Dalam konteks Papua Pegunungan, teori ini relevan karena jarak, topografi, sistem kepemilikan tanah,



jaringan kekerabatan, struktur adat, dan akses transportasi membentuk biaya serta peluang ekonomi secara langsung.

B. Metode Penelitian

1. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan paradigma konstruktivis yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang dipahami melalui pengalaman dan interaksi para pelaku. Harga yang dianggap adil, keberhasilan kelompok, manfaat bantuan, atau arti kemandirian dapat dimaknai berbeda oleh petani, pedagang, pemerintah, perempuan, pemuda, dan tokoh adat. Peneliti karena itu berusaha memahami berbagai perspektif dan menafsirkan hubungan antarperspektif secara reflektif.

Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah memberikan uraian mendalam dan dekat dengan bahasa para partisipan mengenai potensi, tantangan, praktik ekonomi, dan strategi pemberdayaan. Desain multisitus digunakan untuk mempelajari kesamaan dan perbedaan pola di Jayawijaya, Lanny Jaya, dan Yahukimo. Setiap kabupaten dianalisis sebagai situs, kemudian dilakukan analisis lintas situs.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian mencakup Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, dan Yahukimo. Pemilihan dilakukan secara purposif berdasarkan peran pertanian rakyat, variasi akses pasar, dan kedudukan ketiga wilayah dalam jaringan ekonomi Papua Pegunungan. Distrik dan kampung dipilih setelah studi pendahuluan dengan mempertimbangkan sentra komoditas, aksesibilitas, keberadaan kelompok produsen, dan kesediaan masyarakat. Waktu penelitian direncanakan selama

enam bulan, meliputi persiapan, perizinan, pengumpulan data, analisis awal, verifikasi, dan penyusunan laporan.

3. Subjek, Informan, dan Teknik Penentuan Informan

Subjek penelitian ialah pelaku yang mengetahui atau terlibat dalam pertanian, hasil kebun, pemasaran, pembinaan, dan tata kelola ekonomi lokal. Informan mencakup petani perempuan dan laki-laki, pemuda tani, pengurus kelompok, pedagang atau pengepul, pelaku pengolahan, penyuluh, aparat kampung dan distrik, perangkat daerah, tokoh adat, tokoh perempuan, serta mitra pendamping. Pemilihan menggunakan purposive sampling, dilanjutkan snowball sampling secara terkendali untuk menemukan informan kunci yang belum teridentifikasi.

Jumlah informan tidak ditetapkan sebagai sampel statistik. Pengumpulan data dihentikan ketika informasi mencapai kecukupan dan wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan tema substantif baru. Variasi maksimum dijaga berdasarkan jenis kelamin, usia, komoditas, posisi dalam rantai nilai, dan kedekatan dengan pusat pasar. Rencana awal berkisar 42 sampai 60 informan untuk tiga situs, tetapi jumlah akhir harus dilaporkan sesuai pelaksanaan lapangan.

4. Jenis dan Sumber Data

Data primer berasal dari penuturan informan, pengamatan praktik produksi dan pemasaran, serta diskusi kelompok. Data yang dicari meliputi sejarah usaha, kalender produksi, biaya dan risiko, proses penjualan, pembentukan harga, pengalaman menerima program, hubungan kelembagaan, pembagian kerja gender, aspirasi pemuda, dan usulan strategi. Data sekunder berasal dari publikasi BPS,



dokumen perencanaan, laporan perangkat daerah, peraturan, literatur ilmiah, dan catatan program yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur agar topik utama konsisten tetapi informan tetap leluasa menjelaskan pengalaman. Apabila diperlukan, wawancara menggunakan penerjemah lokal yang memahami etika kerahasiaan. Observasi dilakukan pada kebun, tempat panen, penyimpanan, pasar, titik pengangkutan, dan kegiatan kelompok. Peneliti mencatat kondisi fisik, alur kegiatan, alat, interaksi, waktu tunggu, serta situasi yang mendukung atau bertentangan dengan pernyataan informan.

Diskusi kelompok terarah digunakan untuk menguji tema, menyusun peta rantai nilai, membandingkan pengalaman, dan merumuskan prioritas strategi. Kelompok perempuan atau pemuda dapat dipisahkan apabila forum campuran menghambat suara mereka. Studi dokumentasi digunakan untuk memeriksa data statistik, rencana pemerintah, laporan program, foto kegiatan yang diizinkan, serta arsip kelompok. Triangulasi antarteknik dilakukan agar kesimpulan tidak bergantung pada satu sumber.

6. Instrumen Penelitian

Peneliti merupakan instrumen utama yang merencanakan, mengumpulkan, menafsirkan, dan memverifikasi data. Instrumen pendukung meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, panduan FGD, format telaah dokumen, alat perekam dengan izin, kamera apabila diperbolehkan, buku catatan, dan jurnal reflektif. Pedoman disusun berdasarkan dimensi aset lokal, rantai nilai, kapabilitas, kelembagaan, pemberdayaan, inklusi, dan keberlanjutan,

kemudian diuji secara terbatas agar bahasanya mudah dipahami.

7. Teknik Analisis Data

Analisis mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Kondensasi data dilakukan melalui transkripsi, pembacaan berulang, pemberian kode, penulisan memo, dan pengelompokan kategori. Kode awal mencakup potensi komoditas, akses input, pengetahuan lokal, biaya transportasi, susut hasil, informasi harga, hubungan pembeli, peran kelompok, gender, pemuda, bantuan, dan aspirasi. Kode berkembang secara induktif ketika ditemukan isu baru.

Penyajian data dilakukan dalam narasi analitis, matriks situs, peta rantai nilai, dan tabel ringkas. Penarikan kesimpulan berlangsung sejak awal dan selalu diuji melalui pencarian bukti pendukung, kasus negatif, perbandingan sumber, serta konfirmasi kepada informan. Analisis dalam situs dilakukan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan analisis lintas situs untuk menemukan pola yang sama, berbeda, dan bergantung pada konteks.

8. Keabsahan Data dan Refleksivitas

Kredibilitas dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, keterlibatan yang memadai, pengecekan anggota, diskusi sejawat, serta pencarian data yang tidak sesuai pola dominan. Transferabilitas diperkuat dengan deskripsi tebal mengenai lokasi dan pelaku. Dependabilitas dijaga melalui jejak audit yang mencatat perubahan keputusan metodologis, sedangkan konfirmabilitas didukung pemisahan catatan deskriptif, interpretasi, dan refleksi peneliti.

Refleksivitas penting karena posisi, bahasa, afiliasi, dan harapan terhadap



peneliti dapat memengaruhi data. Peneliti mencatat asumsi awal, hubungan dengan informan, situasi wawancara, dan kemungkinan bias. Temuan yang menyenangkan pemerintah atau kelompok tertentu tidak otomatis dianggap lebih benar daripada pengalaman kelompok yang berbeda.

9. Etika Penelitian

Penelitian dilaksanakan setelah memperoleh izin institusional dan sosial yang diperlukan. Persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan diberikan dalam bahasa yang dipahami partisipan. Informan diberi penjelasan mengenai tujuan, kegiatan, risiko, manfaat, kerahasiaan, penggunaan rekaman, dan hak untuk menolak atau menghentikan partisipasi. Proses masuk komunitas menghormati pemimpin kampung dan lembaga adat tanpa menghilangkan hak persetujuan individu.

Identitas informan disamarkan dengan kode, data disimpan secara terbatas, dan kutipan dipilih agar tidak mengungkapkan informasi sensitif. Peneliti tidak menjanjikan bantuan yang tidak dapat diberikan dan mengembalikan ringkasan hasil kepada masyarakat dalam bentuk yang mudah dipahami. Pengetahuan lokal yang berpotensi memiliki nilai komersial tidak dipublikasikan tanpa izin khusus.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Ketiga kabupaten berada dalam lingkungan pegunungan dengan konsentrasi penduduk, akses pasar, dan hubungan transportasi yang berbeda. Jayawijaya memiliki Wamena sebagai pusat

layanan dan perdagangan regional. Lanny Jaya memiliki permukiman dan kebun yang tersebar pada medan pegunungan, sedangkan Yahukimo mempunyai wilayah luas dengan variasi akses darat dan udara yang kuat. Perbedaan tersebut membentuk biaya transaksi dan pilihan komoditas.

Statistik kependudukan menunjukkan skala pelayanan yang besar. Penduduk Jayawijaya pada 2025 tercatat sekitar 278.107 jiwa. Data edisi sebelumnya menunjukkan penduduk Lanny Jaya sekitar 203.524 jiwa dan Yahukimo sekitar 355.612 jiwa pada 2024. Perbedaan tahun rujukan perlu dipahami sebagai keterbatasan ketersediaan data yang seragam, sehingga angka digunakan sebagai gambaran konteks dan tidak diperlakukan sebagai seri pembandingan sempurna.

2. Profil Data Sekunder

Tabel 1. Indikator Kemiskinan Tiga Kabupaten, 2025

Kabupaten	Penduduk miskin (%)	Jumlah (ribu jiwa)	Garis kemiskinan (Rp/kapita/bulan)
Jayawijaya	29,08	61,64	913.719
Lanny Jaya	31,59	68,04	1.019.014
Yahukimo	30,61	62,42	908.562

Sumber: Publikasi resmi BPS kabupaten/provinsi mengenai indikator kemiskinan tahun 2025; angka harus diverifikasi kembali pada edisi final.

Tabel 1 menunjukkan bahwa hampir tiga dari sepuluh penduduk di setiap wilayah hidup di bawah garis kemiskinan. Lanny Jaya memiliki persentase tertinggi



dan garis kemiskinan nominal tertinggi di antara tiga wilayah. Nilai garis kemiskinan yang tinggi dapat berkaitan dengan biaya pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pengaruh logistik. Akan tetapi, indikator moneter perlu dibaca bersama pola konsumsi sendiri, pertukaran nonpasar, dan akses layanan yang tidak seluruhnya tercermin dalam pendapatan tunai.

Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia tiga kabupaten, 2025

Kabupaten	IPM 2025	Catatan interpretatif
Jayawijaya	66,02	Relatif lebih tinggi karena fungsi Wamena sebagai pusat layanan
Lanny Jaya	52,47	Menunjukkan tantangan besar pada kapabilitas dasar
Yahukimo	52,48	Menunjukkan tantangan besar dan variasi akses antarkawasan

Sumber: BPS, data IPM kabupaten tahun 2025.

Perbedaan IPM menegaskan bahwa kapasitas ekonomi lokal dibentuk oleh pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Jayawijaya mempunyai posisi relatif lebih baik, namun kemiskinan tetap tinggi. Lanny Jaya dan Yahukimo memiliki IPM yang hampir sama, sehingga intervensi pertanian perlu berjalan bersama perluasan layanan dasar dan penguatan keterampilan.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2024 diperkirakan sekitar Rp40,73 juta di Jayawijaya, Rp11,96 juta di Lanny Jaya, dan Rp8,47 juta di Yahukimo berdasarkan publikasi BPS yang digunakan dalam penyusunan draf. Perbedaan besar menggambarkan konsentrasi aktivitas jasa, perdagangan, pemerintahan, dan transportasi di Jayawijaya. PDRB per kapita bukan pendapatan yang diterima setiap warga, sehingga tidak boleh ditafsirkan sebagai ukuran langsung kesejahteraan rumah tangga.

Kedudukan Wamena sebagai simpul logistik terlihat dari dominasi bongkar

barang angkutan udara Papua Pegunungan pada 2023, yang sekitar 97,05 persen terjadi melalui Wamena. Konsentrasi ini memberi peluang bagi pasar Jayawijaya sekaligus memperlihatkan ketergantungan kabupaten lain terhadap jaringan distribusi regional. Komoditas segar dari lokasi jauh menanggung risiko biaya tinggi dan waktu tempuh yang panjang.

Pertanian tetap menjadi basis penghidupan. Data historis menunjukkan produksi ubi jalar Jayawijaya mencapai sekitar 73.891 ton pada 2020. Angka ini tidak digunakan sebagai kondisi mutakhir, tetapi sebagai petunjuk skala pentingnya pangan lokal. Di Lanny Jaya, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan masih memberi kontribusi ekonomi yang penting; draf data 2025 mencatat nilai sekitar Rp490,07 miliar dan harus diverifikasi terhadap tabel BPS final. Ketersediaan data komoditas tahunan yang tidak seragam justru menunjukkan perlunya perbaikan sistem informasi produksi dan pasar.

3. Deskripsi Data Primer Simulasi

[DATA PRIMER SIMULASI—WAJIB DIGANTI] Seluruh isi Subbab 3 sampai penanda akhir simulasi disusun sebagai contoh. Jangan mempertahankan angka, lokasi rinci, kutipan, atau kesimpulannya setelah data lapangan tersedia.

Dalam analisis menggunakan 48 informan yang dibagi merata pada tiga kabupaten. Di setiap kabupaten terdapat sembilan petani, dua pedagang, satu pengurus kelompok, satu penyuluh, satu aparat pemerintah, satu tokoh adat atau perempuan, dan satu pemuda. Lokasi contoh ialah Wamena dan Hubikosi di Jayawijaya, Tiom dan Pirime di Lanny Jaya,

serta Dekai dan Kurima di Yahukimo. Pengumpulan data disimulasikan berlangsung pada April sampai Juni 2026 melalui wawancara, observasi, dan tiga FGD.

Informan menggambarkan pertanian sebagai sumber pangan sekaligus sumber tunai yang tidak selalu stabil. Ubi jalar terutama diposisikan sebagai pangan rumah tangga dan komoditas pasar lokal. Sayuran memberikan perputaran uang lebih cepat, tetapi mudah rusak. Kopi dinilai memiliki harga lebih baik, namun memerlukan waktu, mutu, pengolahan, dan jaringan pembeli. Buah lokal mempunyai permintaan musiman, sedangkan komoditas kebun campuran menjaga keragaman pangan dan mengurangi risiko.

Seorang petani Jayawijaya menyatakan, "Kami bisa tanam banyak, tetapi kalau hari pasar lewat dan kendaraan tidak ada, sayur tinggal rusak." Kutipan simulatif ini menggambarkan bahwa kendala utama tidak selalu berada di lahan, melainkan pada sinkronisasi panen, pengangkutan, dan permintaan.

Di Lanny Jaya, informan contoh menekankan jauhnya kebun dari titik kendaraan, biaya angkut, dan terbatasnya tempat penyimpanan. Kelompok pernah menerima alat, tetapi penggunaannya menurun karena bahan bakar, perawatan, pembagian tanggung jawab, dan volume produksi belum direncanakan bersama. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pemberian aset tanpa model pengelolaan tidak otomatis menciptakan kapasitas ekonomi.

Seorang pengurus kelompok menyampaikan, "Mesin pernah datang, tetapi kami belum sepakat siapa yang

merawat dan bagaimana biaya dipungut." Pernyataan ini merupakan contoh untuk menganalisis hubungan antara teknologi, aturan kelompok, dan keberlanjutan.

Di Yahukimo, variasi akses antarkampung menjadi tema dominan. Produsen dekat Dekai memiliki lebih banyak pilihan pembeli, sedangkan lokasi jauh bergantung pada pedagang tertentu atau penerbangan. Pada produk bernilai rendah dan mudah rusak, ongkos angkut dapat menghilangkan keuntungan. Informan menilai komoditas tahan simpan atau hasil olahan sederhana lebih memungkinkan untuk lokasi dengan frekuensi transportasi rendah.

Perempuan disebut memegang peran penting sejak penanaman, pemeliharaan, panen, pengangkutan, hingga penjualan di pasar. Namun keputusan penggunaan bantuan dan pendapatan usaha kelompok lebih sering didominasi laki-laki. Pemuda tertarik pada pemasaran digital, jasa transportasi, kopi, kemasan, dan dokumentasi produk, tetapi memerlukan keterampilan, modal awal, jaringan, dan contoh usaha yang layak.

Hubungan harga bersifat tidak seimbang. Petani umumnya mengetahui harga setelah tiba di pasar atau setelah pedagang memberikan penawaran. Mereka jarang mencatat biaya tenaga kerja keluarga, benih, kemasan, susut, dan transportasi, sehingga keuntungan sering diperkirakan berdasarkan uang tunai yang tersisa. Pedagang menanggung risiko produk tidak terjual dan biaya perjalanan, tetapi memiliki informasi pasar lebih baik.

Program pemerintah dipersepsikan membantu ketika benih, alat, pelatihan, atau fasilitas sesuai kebutuhan. Namun informan mengkritik bantuan yang datang



tanpa konsultasi, tidak disertai pendampingan, atau tidak terhubung dengan pembeli. Penyuluh menghadapi wilayah kerja luas dan keterbatasan mobilitas. Koordinasi antara bidang produksi, perdagangan, koperasi, perhubungan, dan perencanaan masih bersifat program sektoral.

4. Pembahasan Potensi Ekonomi Lokal

Data sekunder dan simulasi data primer menunjukkan bahwa potensi ekonomi lokal tidak dapat dipersempit menjadi daftar komoditas unggulan. Potensi merupakan pertemuan antara kesesuaian lahan, pengetahuan masyarakat, tenaga kerja, jaringan sosial, akses pasar, dan institusi pendukung. Ubi jalar mempunyai nilai pangan dan budaya yang kuat; sayuran cocok bagi pasar perkotaan; kopi berpotensi memasuki pasar bernilai lebih tinggi; sedangkan buah dan kebun campuran memperluas diversifikasi. Setiap komoditas memerlukan model pengembangan berbeda.

Dalam teori pengembangan ekonomi lokal, kekuatan utama terletak pada kemampuan aktor setempat mengorganisasi sumber daya. Karena itu, peningkatan produksi tanpa penguatan pemasaran dapat menurunkan harga ketika pasokan terkonsentrasi. Sebaliknya, promosi pasar tanpa kontinuitas produksi menimbulkan ketidakpercayaan pembeli. Perencanaan komoditas perlu dimulai dari pemetaan kalender tanam, volume, mutu, lokasi, biaya, dan permintaan.

Perbedaan tiga situs mendukung pendekatan berbasis tempat. Jayawijaya dapat berfungsi sebagai pusat konsolidasi, pengolahan, dan distribusi regional karena kedekatannya dengan Wamena. Lanny Jaya membutuhkan penguatan titik kumpul dan

konektivitas dari kebun menuju pusat distrik. Yahukimo memerlukan segmentasi strategi berdasarkan tingkat akses: komoditas segar untuk pasar dekat, sedangkan komoditas tahan simpan atau olahan untuk lokasi dengan transportasi terbatas.

5. Pembahasan Rantai Nilai dan Hambatan Struktural

Rantai nilai pada Gambar 1 memperlihatkan bahwa manfaat lokal tidak hanya ditentukan oleh produksi kebun. Nilai bergerak melalui input, produksi, pascapanen, agregasi dan logistik, serta pasar. Pada setiap mata rantai terdapat titik kritis yang dapat mengurangi bagian nilai produsen; karena itu intervensi perlu dilaksanakan sebagai satu sistem, bukan sebagai bantuan yang berdiri sendiri.

Gambar 1. Rantai Nilai Pertanian Dan Hasil Kebun Di Papua Pegunungan



Sumber: Diolah peneliti berdasarkan Kaplinsky dan Morris (2001), FAO (2014), serta data penelitian.

Hambatan rantai nilai terbentuk secara kumulatif. Keterbatasan benih dan pendampingan memengaruhi mutu; panen yang tidak terjadwal menyebabkan pasokan tidak stabil; ketiadaan sortasi membuat produk bermutu tinggi bercampur dengan mutu rendah; kemasan

dan transportasi yang kurang tepat meningkatkan kerusakan; keterbatasan informasi melemahkan negosiasi. Pada akhirnya, petani menerima harga yang tidak mencerminkan seluruh tenaga dan risiko.

Konsentrasi logistik di Wamena menunjukkan pentingnya pembangunan jaringan hub dan spoke yang tidak membuat seluruh produk harus melewati jalur yang sama. Titik agregasi di distrik dapat mengumpulkan volume, melakukan penimbangan, pencatatan, sortasi, dan penjadwalan kendaraan. Namun pusat agregasi hanya layak apabila ada volume, pengelola, aturan biaya, perawatan, dan kontrak pembeli. Infrastruktur fisik perlu dibangun bersama infrastruktur kelembagaan.

Informasi harga dapat diperbaiki melalui papan harga pasar, pesan singkat, radio komunitas, atau grup komunikasi yang dikelola bersama. Teknologi dipilih sesuai jaringan dan literasi. Transparansi biaya penting agar petani dan pedagang dapat bernegosiasi berdasarkan perhitungan yang wajar. Hubungan yang adil tidak berarti meniadakan keuntungan pedagang, tetapi membagi risiko, informasi, mutu, dan margin secara lebih transparan.

6. Pembahasan Pemberdayaan dan Kapabilitas

Teori Kabeer membantu membedakan antara pemberian sumber daya dan pemberdayaan. Benih, alat, atau modal adalah sumber daya; kemampuan memilih usaha, mengelola kelompok, dan menegosiasikan harga merupakan agensi; sedangkan pendapatan, keamanan pangan, serta suara dalam keputusan merupakan capaian. Program yang hanya berhenti

pada distribusi input belum tentu memperluas agensi.

Tingginya kemiskinan dan rendahnya IPM di dua situs menunjukkan bahwa kemampuan menjalankan usaha dipengaruhi akses pendidikan, kesehatan, transportasi, dan administrasi. Sesuai teori Sen, pembangunan pertanian harus memperluas kebebasan nyata. Pelatihan literasi keuangan, pengelolaan mutu, pemasaran, dan kepemimpinan merupakan bagian dari pembangunan ekonomi, bukan tambahan yang terpisah.

Perempuan perlu diakui sebagai pengambil keputusan ekonomi. Pelatihan harus menyesuaikan waktu kerja dan bahasa, akses pembiayaan tidak boleh bergantung pada kepemilikan aset yang sulit dipenuhi, dan struktur kelompok harus menyediakan ruang kepemimpinan. Pemuda dapat mengambil peran pada kegiatan hilir seperti pengolahan kopi, desain kemasan, informasi harga, logistik, dan pemasaran digital, sehingga pertanian terlihat sebagai bidang usaha yang berkembang.

7. Pembahasan Kelembagaan dan Modal Sosial

Kelompok produsen dapat menurunkan biaya transaksi apabila memiliki tujuan jelas, pencatatan sederhana, pembagian peran, dan mekanisme penyelesaian konflik. Modal sosial berupa kepercayaan dan jaringan kekerabatan menjadi kekuatan, tetapi transparansi tetap diperlukan. Aturan yang hanya dipahami pengurus berpotensi menimbulkan kecurigaan dan menurunkan partisipasi.

Lembaga adat memiliki legitimasi dalam pengaturan tanah dan hubungan sosial, sedangkan pemerintah memiliki



sumber daya kebijakan dan anggaran. Keduanya perlu berkolaborasi tanpa saling menggantikan. Musyawarah komoditas di tingkat distrik dapat mempertemukan kampung, kelompok perempuan, pemuda, pembeli, penyuluh, dan perangkat daerah untuk menyusun agenda produksi serta pasar. Koordinasi lintas sektor harus diterjemahkan ke target wilayah dan rantai nilai yang sama.

8. Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal

Strategi yang relevan ialah membangun klaster ekonomi berbasis distrik. Tahap awal berupa pemetaan partisipatif terhadap komoditas, kalender, volume, pelaku, akses, dan risiko. Berdasarkan peta itu dipilih satu atau dua rantai nilai prioritas yang mempunyai pasar nyata, sesuai agroekologi, dan melibatkan rumah tangga lokal. Pilihan tidak boleh hanya didasarkan pada tren komoditas nasional.

Pada sisi produksi, dukungan diarahkan pada mutu benih, praktik budidaya sesuai lokal, konservasi tanah, dan penyuluhan lapangan. Pada sisi pascapanen, prioritasnya ialah alat sederhana yang dapat dirawat, rumah sortasi, rak pengering, kemasan, timbangan, dan penyimpanan. Pada sisi pasar, dibangun kontrak bertahap, informasi harga, pencatatan transaksi, promosi asal produk, dan kemitraan dengan hotel, pasar, toko, lembaga pendidikan, serta pengadaan pemerintah yang diperbolehkan aturan.

Pembiayaan perlu mengikuti arus kas komoditas. Tabungan kelompok, dana bergulir transparan, kredit musiman, dan pembelian berbasis pesanan dapat lebih sesuai daripada cicilan bulanan yang kaku. Keputusan kredit harus disertai pendidikan

keuangan dan perlindungan dari utang berlebihan. Bantuan pemerintah sebaiknya menjadi investasi kapasitas dengan indikator penggunaan, perawatan, volume, partisipasi, dan manfaat, bukan sekadar jumlah barang yang disalurkan.

Strategi afirmatif bagi Orang Asli Papua harus menjaga kepemilikan dan kendali lokal. Kemitraan eksternal diperlukan untuk teknologi dan pasar, tetapi kontrak harus transparan, dapat dipahami, dan tidak memindahkan risiko secara tidak adil. Evaluasi keberhasilan mencakup pendapatan bersih, susut hasil, harga di tingkat produsen, partisipasi perempuan dan pemuda, kekuatan kelompok, ketahanan pangan, dan kesehatan lingkungan.

9. Sintesis Lintas Kabupaten

Jayawijaya mempunyai keunggulan akses dan fungsi pasar, sehingga strategi dapat menekankan konsolidasi, pengolahan, mutu, dan distribusi regional. Tantangannya adalah memastikan kedudukan sebagai pusat tidak menyerap nilai secara sepihak dari kabupaten lain. Lanny Jaya memerlukan penguatan koneksi kebun-distrik, organisasi produsen, dan fasilitas pascapanen yang mudah dirawat. Yahukimo memerlukan strategi berlapis menurut aksesibilitas serta pengembangan komoditas tahan simpan bagi lokasi terpencil.

Kesamaan ketiga situs terletak pada pentingnya produksi rakyat, tingginya biaya logistik, lemahnya informasi harga, kebutuhan pendampingan, dan perlunya koordinasi. Perbedaannya terletak pada intensitas akses dan kedekatan dengan pasar. Sintesis tersebut menolak program satu paket untuk seluruh wilayah dan mendukung kebijakan yang mempunyai



prinsip umum tetapi desain operasional berbeda per distrik.

Model pada Gambar 2 merangkum hubungan utama hasil penelitian. Potensi lokal selalu bekerja di dalam konteks tempat dan berhadapan dengan hambatan struktural. Proses pemberdayaan memperluas sumber daya, agensi, organisasi, serta inklusi, kemudian diterjemahkan menjadi strategi berbasis distrik. Pertemuan antara pemberdayaan dan strategi inilah yang diharapkan menghasilkan nilai tambah lokal, pendapatan bersih, ketahanan pangan, daya tawar, dan keberlanjutan.

Gambar 2. Model Sintesis Temuan Pengembangan Ekonomi Lokal



Sumber: Diolah peneliti berdasarkan Sen (1999), Kabeer (1999), Blakely dan Leigh (2017), serta data penelitian.

10. Keterbatasan Hasil

Bab ini memiliki keterbatasan mendasar karena data primer masih simulatif. Tidak ada klaim empiris yang boleh dibuat dari kutipan atau angka simulasi. Data sekunder juga berasal dari tahun yang tidak sepenuhnya seragam dan sebagian indikator komoditas bersifat historis. Setelah penelitian lapangan, peneliti harus memperbarui profil informan, menyajikan bukti yang

berlawanan, memeriksa kembali angka BPS, menjelaskan perubahan tema, dan memastikan bahwa interpretasi tidak melebihi jangkauan data.

D. Penutup

1. Simpulan

Pertanian dan hasil kebun merupakan basis strategis pengembangan ekonomi lokal di Papua Pegunungan karena terhubung dengan pangan, pendapatan, budaya, pengetahuan, dan penggunaan sumber daya lokal. Ubi jalar, sayuran dataran tinggi, kopi, buah, dan kebun campuran mempunyai fungsi serta peluang pasar yang berbeda. Potensi tersebut baru menghasilkan nilai ketika produksi dihubungkan dengan mutu, pascapanen, transportasi, informasi, organisasi, dan permintaan.

Data BPS menunjukkan konteks pembangunan yang berat. Tingkat kemiskinan 2025 berada pada 29,08 persen di Jayawijaya, 31,59 persen di Lanny Jaya, dan 30,61 persen di Yahukimo. IPM pada tahun yang sama sebesar 66,02, 52,47, dan 52,48. Angka ini menegaskan perlunya menghubungkan pengembangan usaha dengan pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan akses layanan agar pertumbuhan ekonomi memperluas kapabilitas masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan utama bersifat sistemik: akses kebun menuju pasar lemah, biaya transportasi tinggi, susut produk segar besar, fasilitas pascapanen terbatas, informasi harga tidak seimbang, kelembagaan produsen belum stabil, dan program bantuan tidak selalu terhubung dengan pasar. Perempuan memegang peran produksi dan perdagangan yang

penting tetapi belum selalu mempunyai otoritas yang setara, sedangkan pemuda menunjukkan minat pada kegiatan hilir namun membutuhkan ekosistem pendukung.

Perbedaan aksesibilitas membuat strategi harus berbasis tempat. Jayawijaya berpotensi menjadi pusat konsolidasi dan pengolahan; Lanny Jaya memerlukan penguatan titik kumpul, organisasi produsen, dan konektivitas; sementara Yahukimo membutuhkan segmentasi antara komoditas segar untuk pasar dekat dan komoditas tahan simpan atau olahan untuk wilayah terpencil. Pengembangan ekonomi lokal yang tepat bersifat partisipatif, afirmatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, pemberdayaan bukan distribusi bantuan, melainkan proses memperluas sumber daya, agensi, daya tawar, dan capaian masyarakat. Keberhasilan harus diukur melalui perubahan pendapatan bersih, pengurangan susut, kestabilan pasar, ketahanan pangan, kepemimpinan perempuan dan pemuda, transparansi kelompok, serta kemampuan masyarakat mempertahankan manfaat setelah program selesai.

2. Saran

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah kabupaten disarankan membangun kebijakan lintas sektor yang berpusat pada rantai nilai prioritas per distrik. Perencanaan pertanian, perdagangan, koperasi, perhubungan, pekerjaan umum, pendidikan vokasi, dan pemberdayaan kampung perlu menggunakan peta komoditas, kalender produksi, akses, volume, serta pasar yang sama. Anggaran

sebaiknya mengutamakan hubungan antara sarana, pendampingan, kelembagaan, dan pembeli.

Pemerintah kabupaten perlu mengembangkan titik konsolidasi yang dikelola secara transparan dan bertahap. Fasilitas tidak harus besar; timbangan, tempat sortasi, rak pengering, kemasan, penyimpanan, dan pencatatan dapat memberikan dampak apabila sesuai kebutuhan. Sebelum alat diserahkan, kelompok perlu menyepakati kepemilikan, jadwal penggunaan, biaya operasi, perawatan, dan pelaporan.

Kelompok petani dan kelembagaan kampung disarankan memperkuat administrasi sederhana, menghitung biaya serta keuntungan, mencatat volume dan harga, dan menyusun jadwal produksi. Keterwakilan perempuan dan pemuda perlu diwujudkan dalam hak bicara, kepengurusan, akses aset, dan kendali atas pendapatan, bukan hanya kehadiran. Lembaga adat dapat membantu memastikan legitimasi, perlindungan tanah, serta penyelesaian konflik.

Pelaku pasar dan mitra usaha disarankan membangun kemitraan berbasis transparansi mutu, harga, biaya logistik, volume, dan pembagian risiko. Kontrak perlu menggunakan bahasa yang dipahami masyarakat dan diuji secara bertahap. Perguruan tinggi dapat mendukung pemetaan, pelatihan pengolahan, desain kemasan, pembukuan, teknologi tepat guna, dan evaluasi independen, dengan tetap mengakui hak atas pengetahuan lokal.

Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian komoditas yang lebih mendalam, menghitung margin rantai nilai, membandingkan musim, menilai dampak



gender, dan mengevaluasi kelayakan fasilitas pascapanen. Draf ini harus diperbarui dengan data primer autentik. Setiap kutipan fiktif dihapus, jumlah informan disesuaikan, kasus yang menyimpang dilaporkan, dan simpulan ditulis ulang berdasarkan temuan terverifikasi.

E. Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya. (2025). Kabupaten Jayawijaya dalam angka 2025. BPS Kabupaten Jayawijaya.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya. (2026). Kabupaten Jayawijaya dalam angka 2026. BPS Kabupaten Jayawijaya.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lanny Jaya. (2025). Kabupaten Lanny Jaya dalam angka 2025. BPS Kabupaten Lanny Jaya.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lanny Jaya. (2026). Kabupaten Lanny Jaya dalam angka 2026. BPS Kabupaten Lanny Jaya.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Yahukimo. (2025). Kabupaten Yahukimo dalam angka 2025. BPS Kabupaten Yahukimo.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Yahukimo. (2026). Kabupaten Yahukimo dalam angka 2026. BPS Kabupaten Yahukimo.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Pegunungan. (2024). Statistik transportasi Provinsi Papua Pegunungan 2023. BPS Provinsi Papua Pegunungan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Pegunungan. (2025). Indikator penting Provinsi Papua Pegunungan, Desember 2025. BPS Provinsi Papua Pegunungan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Pegunungan. (2026). Provinsi Papua Pegunungan dalam angka 2026. BPS Provinsi Papua Pegunungan.
- Barca, F., McCann, P., & Rodríguez-Pose, A. (2012). The case for regional development intervention: Place-based versus place-neutral approaches. *Journal of Regional Science*, 52(1), 134–152. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9787.2011.00756.x>
- Blakely, E. J., & Leigh, N. G. (2017). *Planning local economic development: Theory and practice* (6th ed.). SAGE Publications.
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Chambers, R., & Conway, G. R. (1992). *Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century*. Institute of Development Studies.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Department for International Development. (1999). *Sustainable livelihoods guidance sheets*. DFID.
- Novie Wijaya, Rafi Ohorella, Meilya Suzan Triyastuti, & Retno Dwi Jayanti. (2025). Pengaruh Analisis Internal Dan Eksternal Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah . *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 94-105. <https://doi.org/10.57094/jpe.v6i2.2657>



- Eka Sulistya Anggraeni, & Niniek Imaningsih. (2025). Klasifikasi Daerah Dan Pengaruh Sektor Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Grobogan. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 34-46. <https://doi.org/10.57094/jpe.v8i2.2934>
- Gombo, M., Ketut Suma, I Made Candiasa, & I Nyoman Jampel. (2025). Implementasi Manajemen Keuangan Sederhana Pada Usaha Pinang Tradisional Di Wamena: Tantangan Dan Peluang Dalam Konteks Pendidikan Kewirausahaan. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(1), 94-108. <https://doi.org/10.57094/jpe.v6i1.2858>
- Gombo, M. (2025). Integrasi Kearifan Lokal Te Aro Naweak Lako Dalam Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar. *Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 15-27. <https://doi.org/10.57094/haga.v4i1.2978>
- Ellis, F. (2000). Rural livelihoods and diversity in developing countries. Oxford University Press.
- Food and Agriculture Organization. (2014). Developing sustainable food value chains: Guiding principles. <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/i3953e>
- Food and Agriculture Organization. (2017). The future of food and agriculture: Trends and challenges. FAO.
- Freire, P. (2005). Pedagogy of the oppressed (30th anniversary ed.). Continuum. (Original work published 1970)
- Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. *Review of International Political Economy*, 12(1), 78–104.
- International Labour Organization. (2006). A local economic development manual for China. ILO.
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
- Kaplinsky, R., & Morris, M. (2001). A handbook for value chain research. Institute of Development Studies.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
- North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>
- Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>
- Porter, M. E. (1998). Clusters and the new economics of competition. *Harvard Business Review*, 76(6), 77–90.
- Putnam, R. D. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton University Press.
- Rodríguez-Pose, A. (2013). Do institutions matter for regional development? *Regional Studies*, 47(7), 1034–1047.



- Saldaña, J. (2021). The coding manual for qualitative researchers (4th ed.). SAGE Publications.
- Sen, A. (1999). Development as freedom. Alfred A. Knopf.
- Scoones, I. (1998). Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis. Institute of Development Studies.
- Stake, R. E. (2006). Multiple case study analysis. Guilford Press.
- United Nations Development Programme. (2016). Local economic development: A primer. UNDP.
- World Bank. (2006). Local economic development: A primer—Developing and implementing local economic development strategies and action plans. World Bank.
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya. (2025, November 3). Tingkat kemiskinan Kabupaten Jayawijaya turun menjadi 29,08 persen pada Maret 2025. <https://jayawijayakab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/03/288/tingkat-kemiskinan-kabupaten-jayawijaya-turun-menjadi-29-08-persen-pada-maret-2025.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Yahukimo. (2025, November 3). Persentase penduduk miskin Maret 2025 di Kabupaten Yahukimo turun menjadi 30,61 persen. <https://yahukimokab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/03/77/persentase-penduduk-miskin-maret-2025-di-kabupaten-yahukimo-turun-menjadi-30-61-persen.html>

